



Genealogi Konflik Etnis Dayak dan Madura Di Kalimantan Barat

The Genealogy of Ethnic Conflict Between the Dayak and
Madurese in West Kalimantan

Agus Darmaji, M. Amin Nurdin & Muhammad Hafiy bin Abd Razak

Abstract: *Conflict is a persistent social phenomenon in human life, often triggered by social change, differences in authority, interests, and culture. As a nation with high ethnic diversity, Indonesia is particularly vulnerable to ethnic conflict. This article aims to explore the genealogy of ethnic conflicts and propose alternative resolutions through a case study of the conflict between the Dayak and Madurese ethnic groups in West Kalimantan. The research employs documentation methods and Focus Group Discussions (FGDs) to gather data from relevant institutions, researchers, intellectuals, and conflict survivors. The findings reveal that conflicts are often sparked by personal incidents, yet their escalation is influenced by social, cultural, economic, and political factors. The limited role of the government in addressing these conflicts is identified as one of the main barriers to resolution. This article recommends multiculturalism-based resolution approaches and cross-cultural dialogue as efforts to build harmonious relationships between ethnic groups.*

Keywords: Conflict; Dayak Ethnic; Madurese Ethnic; Conflict Resolution

Abstrak: Konflik merupakan fenomena sosial yang terus ada dalam kehidupan manusia, sering kali dipicu oleh perubahan sosial, perbedaan otoritas, kepentingan, dan budaya. Sebagai negara dengan keragaman etnis yang tinggi, Indonesia rentan terhadap konflik etnis. Artikel ini bertujuan mengungkap genealogi konflik etnis serta menawarkan alternatif resolusi konflik melalui studi kasus konflik antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengumpulkan data dari lembaga terkait, peneliti, intelektual, serta penyintas konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sering kali dipicu oleh insiden personal, namun eskalasinya dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Minimnya peran pemerintah dalam menangani konflik menjadi salah satu hambatan utama dalam penyelesaian. Artikel ini merekomendasikan pendekatan resolusi berbasis multikulturalisme dan dialog lintas budaya sebagai upaya membangun hubungan yang harmonis antara kelompok etnis.

Kata Kunci: Konflik; Etnis Dayak; Etnis Madura; Resolusi Konflik

Pendahuluan

Dalam sejarah Indonesia, ketegangan dan konflik etnis, agama, budaya, dan politik telah menjadi bagian dari potret interaksi masyarakat. Sejak menjelang kemerdekaan hingga era reformasi, masalah ini tidak pernah terselesaikan secara tuntas.¹ Perbedaan primordial sering menjelma menjadi pertentangan, sehingga pada gilirannya melahirkan rasa tidak nyaman untuk hidup bersama. Semenjak awal, pada masa kolonial ketegangan ini memang cukup terasa di kalangan para aktivis etnis dan penggiat agama. Salah satunya dipicu oleh kebijakan etnis dan agama yang dianggap kurang netral dalam menjembatani hubungan antar etnis dan pemeluk agama di tanah air. Untungnya, dalam konteks ini, keresahan itu tidak berakibat pada konflik horizontal antar kelompok etnis dan agama. Sebab, pada masa reformasi ini, terjadi kesepakatan tidak tertulis (*silent consensus*) antar para pemimpin etnis dan agama untuk tetap menjaga keutuhan negara yang baru dibentuk.

Indonesia sebagai sebuah negara yang mengalami berbagai konflik yang mendera masyarakat Indonesia. Suatu konflik yang terjadi sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan konflik dengan sejumlah aspek kehidupan. Konflik sosial tidak hanya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial, tetapi sering dipengaruhi oleh kecemburuan ekonomi, politik, dan perbedaan agama.² Kasus konflik-konflik etnis misalnya terjadi dan di antaranya di Poso pada 1998-2001 yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti politik yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan daerah oleh beberapa kelompok, migrasi yang berkaitan dengan pribumi dan pendatang, politisasi agama demi kepentingan kelompok orang, dan lemahnya penegakan hukum.³ Keragaman eksistensi kelompok etnis di Indonesia merupakan bagian dalam kelompok primordial, yang menurut Clifford Geertz hadir sebagai sesuatu yang *given* dari hasil konstruksi sosial yang cukup lama.⁴ Komunitas

etnis adalah sebuah *ascriptive criteria* yang membedakan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Etnisitas merupakan sebuah pertalian primordial dalam makna sesuatu yang terkait dengan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan seseorang dan secara tradisional ada di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang terus menerus hadir di masa lampau hingga saat ini, dan sebagai sesuatu kesadaran kolektif.⁵

Akar-akar identitas primordial sekarang semakin mengemuka di berbagai belahan dunia seperti yang dikemukakan oleh Fukuyama dalam bukunya *Identity: The Demand for Dignity and the Politics Resentment* merupakan sinyal bagi kebangkitan suatu entitas agama, etnis, ras, dan politik. Emosi etnis bermunculan sebagai bagian dari *politic of recognition* yang menyangkut kehormatan (*dignity*).⁶ Di sini ada unsur spiritualitas yang dirasakan sakral yang mampu menggerakkan masyarakat untuk bangkit melawan arogansi suatu kekuasaan yang dominan.

Identitas faktor keragaman budaya Indonesia sekaligus juga memiliki potensi untuk menimbulkan konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa. Karena konflik antar budaya dapat menimbulkan pertikaian antar etnis, antar penganut agama, ras maupun antar golongan yang bersifat sangat sensitif dan rapuh terhadap suatu keadaan yang menjurus ke arah disintegrasi bangsa. Fenomena ini dapat terjadi, apabila konflik tersebut tidak dikendalikan dan diselesaikan secara arif dan bijaksana oleh pemerintah bersama seluruh komponen anak bangsa.⁷

Persebaran suku-suku di Indonesia, Faturrochman menyebutkan ada potensi enam hal yang melatar belakangi konflik etnis terjadi, yaitu: kepentingan yang sama di antara beberapa pihak, perebutan sumber daya, sumber daya yang terbatas, kategori atau identitas yang berbeda, prasangka atau diskriminasi. Beragamnya suku, agama, ras dan golongan membuat Indonesia sebagai bangsa yang rawan konflik. Semboyan yang terdapat di kaki sang burung garuda “Bhineka Tunggal Ika” tampak hanya menjadi wacana. Beberapa peristiwa akibat konflik setelah lepas dari otoritas Orde Baru dan lahir era Reformasi seperti: Krisis Aceh dengan adanya GAM (Gerakan Aceh Merdeka), Krisis Ambon yang memicu perpecahan bangsa karena keyakinan, Krisis Poso Sulawesi Tengah, Gerakan Papua Merdeka dan masih banyak lagi.⁸

Konflik etnis adalah konflik yang terkait dengan permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya dan teritorial di antara dua kelompok etnis atau lebih. Konflik etnis sering kali bermotif jenis kekerasan dan menjatuhkan korban, etnik atau suku bangsa, biasanya memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda. Dengan demikian tidak heran adanya pemetaan wilayah dan perbedaan etnis juga sering kali menjadi sumber konflik bagi kemajemukan Indonesia.⁹ Berdasarkan pemetaan dan persebaran suku-suku di Indonesia konflik itu terjadi karena masing-masing memiliki keanekaragaman ciri khas dan tradisi yang ada pada setiap provinsi. Persebaran suku ini membentang dari Kepulauan Sabang sampai Merauke.

Berdasarkan data dari sensus BPS pada tahun 2010, terdapat lebih dari 300 kelompok ras etnis suku bangsa di Indonesia, atau sekitar 1300 suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi. Pulau Jawa menduduki peringkat pertama suku bangsa terbesar di Indonesia. Sekitar kurang lebih 40% dari total jumlah suku bangsa yang ada Indonesia.¹⁰

Secara historis, Kalimantan Barat telah mengalami konflik yang berulang-ulang dan melibatkan komunitas dari etnis yang berbeda, dimulai sejak peristiwa 1950, yaitu perkelahian antara orang-orang Madura dengan Dayak; pada tahun 1967 terjadi kerusuhan sosial yang melibatkan orang Dayak dengan Cina. Pertikaian berlanjut pada tahun 1979 kerusuhan antara Madura dengan Dayak; tahun 1983 konflik Madura dengan Dayak dan tahun 1997 terjadi konflik antara orang Madura dengan Dayak di Sanggau Ledo, Sambas. Kemudian, di akhir tahun 1999 dan awal tahun 2000 terjadi kerusuhan besar lagi antara orang Madura dengan orang Melayu di Sambas, yang kemudian juga diduga melibatkan orang-orang Dayak yang membantu orang Melayu.¹¹

Berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas, sejarah konflik antar etnik di Indonesia merupakan suatu sejarah yang panjang. Peristiwa dan isu konflik tersebut telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Munculnya wacana multikultural merupakan reaksi terhadap perhatian konflik etnis dengan adanya pluralitas yang begitu kompleks di dalam masyarakat, yang di dalamnya tidak hanya pengakuan yang dibutuhkan, tetapi juga kesadaran budaya yang inklusif dan transformatif. Suparlan menyatakan “Multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya (*culture pluralism*) dengan menekankan kesamaan derajat kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat. Pluralisme merupakan ideologi yang berkembang pada masyarakat plural (*plural society*).¹²

Keragaman suku-suku di Indonesia, bila tidak dikelola dengan baik akan dapat memecahkan kesatuan bangsa, karena hubungan sosial masing-masing suku jika ditelusuri lebih mendalam memperlihatkan rasa keakuannya, rasa ‘kami’ dan ‘mereka’. Mereka melihat etnis lain adalah kelompok luar dan menjadi musuh baginya. Setiap konflik yang berujung SARA bermula dari konflik individu yang kemudian mengarah kepada konflik kolektif yang mengatasnamakan etnis.¹³

Untuk mencari solusi bagaimana memecahkan persoalan konflik etnis diperlukan prinsip-prinsip dasar multikultural yang mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat seperti etnik, ras, budaya, gender, strata sosial, agama, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi yang akan sangat membantu bagi terwujudnya perubahan perilaku yang kondusif dan sangat menjanjikan di tengah kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk. Dengan demikian pendekatan multikultural tidak berlandaskan pada kepemilikan yang mengisyaratkan

pada memiliki atau dimiliki budaya tertentu tetapi berlandaskan pada kesadaran untuk menghargai dan menghormati.

Wawasan multikultural merupakan suatu paham tentang penghargaan, dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun hak-hak komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan budayanya. Jadi pada dasarnya multikultural merupakan gagasan yang mengatur keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri.¹⁴

Sejak tahun 1960-an, Kalimantan Barat telah mengalami sembilan kali konflik besar, delapan di antaranya melibatkan komunitas Dayak dan pendatang Madura, sementara satu lainnya dengan Melayu Sambas. Selama konflik tersebut, Melayu Sambas tidak pernah bergabung dengan Dayak dalam menghadapi Madura meskipun memiliki pengalaman serupa. Jamal Bake, Rinusu, dan Muhammad Abas dalam *Netralitas yang Semu* (2000) menjelaskan bahwa akar konflik sering kali bersumber dari negara yang hegemonik, represif, dan cenderung memarginalisasi rakyat. Akibatnya, rakyat terkadang melawan melalui gerakan separatis atau tindakan melanggar hukum yang mengesampingkan norma sosial.¹⁵

Yudie Haryono dalam artikelnya *Neo Tribalisme* (2000) mengklasifikasikan konflik sosial menjadi dua: kerusuhan kolektif akibat munculnya *ke-aku-an* (SARA) dan kerusuhan akibat kejahatan negara (*state crime*).¹⁶ Contoh kerusuhan kolektif termasuk konflik di Banyuwangi, Tasikmalaya, Ambon, dan Medan, sementara konflik berbasis *state crime* terlihat pada kasus Tanjung Priok dan Irian Jaya.

Redaksi Harian Republika dalam *Kerusuhan Sambas 1999: Penyebab, Kronologi, Dan Dampak*, menyoroti faktor pemicu konflik, seperti keterbelakangan ekonomi, dominasi pendatang dalam penguasaan tanah, kurangnya penghormatan terhadap adat setempat, serta dominasi politik dan birokrasi.¹⁷ Kajian Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) menambahkan bahwa marginalisasi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang dialami Dayak menjadi penyebab utama konflik. Ketidaksihan ini memicu eskalasi kekerasan yang berdampak buruk pada penduduk lokal maupun pendatang, termasuk pelanggaran HAM.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi genealogi konflik etnis antara Dayak dan Madura serta menawarkan alternatif model resolusi konflik. Rumusan masalah yang diajukan mencakup: mengapa konflik etnis Dayak dan Madura terjadi, bagaimana kronologi serta pola konfliknya, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut secara berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Untuk Dokumentasi, kami menelaah penelitian-penelitian tentang konflik

etnis Dayak dan Madura yang telah dilakukan khususnya dari lembaga-lembaga seperti CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies)-UGM, Yogyakarta; Setara Institut, Wahid Institut, dan Ma'arif Institut yang ada di Jakarta. Selain itu juga dokumen-dokumen berupa skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal.

Selanjutnya akan dilakukan FGD dengan masing-masing etnis Dayak dan Madura. FGD melibatkan orang-orang yang pernah meneliti salah satu atau kedua etnis tersebut, dan diusahakan untuk mengundang orang-orang yang pernah terlibat dalam konflik dari kedua etnis tersebut. FGD ini dilakukan untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui dokumen dan juga, jika dimungkinkan, untuk menambah data baru. FGD dengan etnis Dayak melibatkan lembaga seperti MADN (Majelis Adat Dayak Nasional), DAD (Dewan Adat Dayak), dan para intelektual yang berasal dari etnis Dayak serta ditambah penyintas konflik. Sedangkan FGD dengan etnis Madura melibatkan IKAMA (Ikatan Keluarga Madura) Jakarta, peneliti tentang Madura, para intelektual dari etnis Madura, dan penyintas konflik.

Faktor Utama Penyebab Konflik Etnis Dayak-Madura

Hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan kedua kelompok etnis mengungkapkan empat faktor utama yang menjadi penyebab konflik antara masyarakat Dayak dan Madura di Kalimantan Barat.

1. **Perbedaan Budaya dan Persepsi Ancaman.** Perbedaan budaya yang signifikan menjadi salah satu akar konflik. Budaya Madura, yang dikenal dengan etos kerja keras dan kemampuan bertahan di berbagai situasi, sering kali dianggap mengancam oleh masyarakat Dayak yang agraris. Budaya agraris Dayak yang lebih terikat pada tanah dan sumber daya lokal berkonflik dengan pendekatan masyarakat Madura yang lebih pragmatis dan kompetitif. Perbedaan ini menciptakan ketimpangan ekonomi, yang pada gilirannya memunculkan persepsi bahwa masyarakat Dayak dimarginalkan di tanah mereka sendiri. Menurut teori identitas primordial Clifford Geertz, konflik seperti ini dapat terjadi karena identitas budaya yang melekat menjadi sumber ketegangan ketika suatu kelompok merasa terancam oleh kehadiran kelompok lain.¹⁹
2. **Stereotip Negatif terhadap Masyarakat Madura.** Faktor kedua adalah stereotip negatif yang berkembang terhadap masyarakat Madura. Dengan latar belakang pendidikan mayoritas menengah ke bawah, masyarakat Madura sering dicitrakan sebagai kasar, sombong, egois, suka membawa senjata tajam, dan kurang adaptif terhadap lingkungan lokal. Pola pemukiman mereka yang cenderung eksklusif semakin memperburuk hubungan antar kelompok. Stereotip semacam ini sesuai dengan konsep *othering* dalam teori konflik sosial, di mana satu kelompok mendefinisikan identitas kelompok lain secara negatif untuk memperkuat posisi sosial mereka sendiri.²⁰

3. **Ketimpangan Ekonomi dan Marginalisasi.** Ketimpangan ekonomi juga memainkan peran penting dalam konflik ini. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat Dayak mengakibatkan hilangnya akses mereka terhadap sumber daya alam seperti hutan dan sungai, yang merupakan bagian integral dari kehidupan mereka. Ketimpangan ini memicu rasa frustrasi dan dendam, terutama terhadap masyarakat Madura yang dianggap mengambil alih habitat asli mereka. Dalam teori kekerasan struktural Johan Galtung, situasi ini menggambarkan bagaimana struktur sosial yang tidak adil dapat menciptakan kondisi yang memperbesar potensi konflik.²¹
4. **Dimensi Politik dan Hilangnya Representasi Lokal.** Pada masa Orde Lama, masyarakat Dayak memiliki representasi politik yang signifikan di tingkat eksekutif dan legislatif. Namun, pada era Orde Baru, mereka kehilangan dominasi politik lokal, yang digantikan oleh pendatang dari luar Kalimantan, termasuk masyarakat Madura. Pergeseran ini tidak hanya melemahkan posisi tawar masyarakat Dayak tetapi juga menciptakan ketegangan mendalam antara kelompok etnis. Menurut teori konflik sosial Ralf Dahrendorf, konflik sering kali muncul ketika ada perubahan distribusi kekuasaan yang tidak adil, yang dalam hal ini menghilangkan akses masyarakat Dayak terhadap pengambilan keputusan politik di daerah mereka.²²

Akumulasi faktor budaya, ekonomi, dan politik membuat hubungan antara masyarakat Dayak dan Madura semakin kompleks. Masyarakat Dayak sering kali memandang kedatangan masyarakat Madura sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dan hak mereka, terutama dalam hal budaya dan tanah adat. Sebaliknya, masyarakat Madura melihat keberhasilan mereka dalam bekerja sebagai konsekuensi wajar dari etos kerja keras dan kemampuan bersaing secara ekonomi. Ketegangan ini mencerminkan apa yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai konflik berbasis identitas primordial, di mana ikatan budaya dan etnis menjadi sumber ketegangan ketika ada perebutan sumber daya atau ruang sosial.²³

Dari perspektif agama, kelompok masyarakat Dayak secara umum sepakat bahwa konflik tidak berhubungan dengan agama. Bagi mereka, agama adalah sesuatu yang suci dan universal, harus dihormati tanpa memandang asal-usul etnis dan ras. Pendekatan ini mencerminkan penghormatan Dayak terhadap pluralitas agama di wilayah mereka. Sebaliknya, beberapa responden dari kelompok Madura mengindikasikan bahwa faktor agama mungkin turut memengaruhi dinamika konflik, terutama melalui munculnya fundamentalisme agama atau upaya misionaris untuk memperluas penganut. Hal ini sejalan dengan teori "*conflict of interest*" oleh Samuel P. Huntington, di mana faktor agama dapat menjadi instrumen mobilisasi identitas dalam masyarakat yang multikultural.²⁴

Selain faktor agama, teori konspirasi juga muncul sebagai salah satu penyebab konflik. Beberapa responden menyebutkan bahwa kelompok tertentu dengan agenda tersembunyi berusaha memanfaatkan situasi untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi atau kekuasaan tertentu. Misalnya, kedatangan migran ke wilayah Dayak dianggap sebagai penyebab hilangnya tanah adat mereka. Hal ini meningkatkan kecemburuan sosial dan memicu rasa dendam yang mendalam. Sikap eksklusif dari pendatang, termasuk enggan berakulturasi dengan masyarakat lokal, semakin memperburuk situasi dan menciptakan *clash of civilizations* atau benturan budaya yang berujung pada konflik berskala besar.²⁵

Pendekatan teori konflik sosial oleh Johan Galtung dapat membantu menjelaskan fenomena ini. Galtung mengemukakan bahwa kekerasan struktural terjadi ketika ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik dibiarkan tanpa solusi, yang pada akhirnya menciptakan kondisi bagi konflik terbuka. Dalam konteks Dayak-Madura, perasaan kehilangan tanah adat dan marginalisasi sosial memperbesar potensi konflik komunal.²⁶

Jumlah bentrokan komunal antara masyarakat Madura dan kelompok-kelompok lain sebelum akhir 1990-an ternyata tidak sebanyak yang sering diasumsikan. Petebang dan Sutrisno, misalnya, merujuk pada “kerusuhan” tahun 1993 di Sukadana, Kabupaten Ketapang, yang sebenarnya adalah pemberontakan sejumlah kecil orang Madura yang dijual sebagai budak kepada majikan setempat oleh seorang nakhoda.²⁷ Peristiwa ini menggambarkan kompleksitas dinamika sosial yang melampaui narasi konflik etnis, dengan menunjukkan bagaimana faktor-faktor lain seperti eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan sosial dapat memainkan peran dalam menciptakan konflik lokal.²⁸

Dinamika Konflik Dayak-Madura dan Marginalisasi Ekonomi

Dalam sejarah konflik antara masyarakat Dayak dan Madura, bentrokan besar yang melibatkan banyak orang relatif jarang terjadi hingga akhir 1970-an. Insiden pertama yang signifikan terjadi pada tahun 1977, ketika seorang polisi Dayak ditikam oleh seorang Madura, memicu kerusuhan yang menewaskan lima orang dan menghancurkan 72 rumah. Dua tahun kemudian, serangan terhadap seorang Dayak oleh sejumlah orang Madura kembali memicu bentrokan komunal yang menewaskan 20 orang dan menghancurkan 92 rumah. Sebagai respons, pemerintah provinsi menginisiasi perjanjian damai yang dilambungkan dengan pendirian tugu peringatan. Namun, perjanjian ini gagal mengatasi ketegangan, dan pada tahun 1993, konflik kembali pecah di kawasan yang sama.

Insiden-insiden ini tidak secara langsung menyebabkan “perang” suku yang pecah pada akhir 1990-an. Namun, peristiwa-peristiwa tersebut memperkuat stereotip negatif yang telah ada terhadap masyarakat Madura. Dalam pandangan

masyarakat Dayak dan Melayu, insiden-insiden ini menciptakan iklim kebencian dan ketakutan yang mempermudah mobilisasi massa untuk menyalahkan orang Madura atas berbagai kekecewaan yang dirasakan masyarakat lokal.²⁹

Sebagian besar literatur tentang konflik Dayak-Madura menyoroti bagaimana marginalisasi ekonomi masyarakat Dayak di bawah rezim Orde Baru menjadi salah satu akar permasalahan. Peluso dan Harwell menjelaskan bahwa kawasan hutan yang luas, yang selama masa kolonial dikelola berdasarkan hukum adat dan dianggap sebagai tanah pribumi, secara bertahap diambil alih oleh negara.³⁰ Transformasi ini menghilangkan akses masyarakat Dayak terhadap sumber daya yang sebelumnya menjadi fondasi ekonomi mereka, seperti perladangan berpindah dan pemanfaatan hasil hutan.

Dalam teori kekerasan struktural Johan Galtung, kondisi ini dapat digambarkan sebagai bentuk kekerasan yang tidak langsung tetapi sangat merugikan.³¹ Marginalisasi ekonomi dan pengambilalihan tanah adat menciptakan ketimpangan sosial yang mendalam, memperburuk rasa frustrasi, dan meningkatkan potensi konflik. Dalam konteks ini, masyarakat Madura sering kali diposisikan sebagai simbol dari perubahan tersebut, meskipun kebijakan negara dan eksploitasi oleh perusahaan besar menjadi penyebab utama.

Sebagaimana dijelaskan oleh Horowitz, konflik antar kelompok etnis sering kali dipicu oleh perubahan lokal atau regional yang mengganggu keseimbangan hubungan sosial yang ada.³² Dalam kasus Dayak dan Madura, transformasi ekonomi yang mendisrupsi akses masyarakat Dayak terhadap sumber daya lokal menjadi pemicu ketegangan yang lebih besar. Ketegangan ini diperburuk oleh perubahan hubungan antara masyarakat lokal dengan negara, di mana kebijakan sentralisasi dan modernisasi Orde Baru dianggap mengabaikan kebutuhan kelompok pribumi.

Peristiwa-peristiwa seperti konflik tahun 1977, 1979, dan 1993 menunjukkan bagaimana insiden kecil dapat berkembang menjadi bentrokan besar dalam konteks ketegangan yang sudah ada. Insiden-insiden ini juga memperkuat citra negatif tertentu yang dilekatkan pada masyarakat Madura, yang kemudian menjadi dasar mobilisasi kebencian dalam konflik berskala lebih besar pada akhir 1990-an.³³

Di bawah Soeharto, hak-hak tanah orang Dayak dibatasi secara ketat, di mana lahan apa pun yang tidak terus-menerus dipakai, termasuk lahan kosong, dikategorikan dan diambil-alih sebagai tanah negara.³⁴ Kemudian, sebagai bagian dari kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, lahan itu dikapling kecil-kecil dan dibagikan kepada pendatang, dan kapling-kapling tanah yang lebih besar dibagikan kepada pemilik perkebunan dan perusahaan perkayuan yang sebagian besar sahamnya sering dimiliki oleh negara dan manifestasi-manifestasinya, seperti tentara dan berbagai cabang kementerian di tingkat provinsi. Orang Dayak bukan saja harus pindah ke permukiman baru dan menolerir orang luar yang bermukim di

tanah yang mereka percaya tanah pusaka adat mereka, melainkan juga menyaksikan orang luar memetik hasil terbesar dari proses pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung. Sebagian besar sumber daya, pekerjaan, dan keuntungan mengalir ke orang-orang dari luar, orang-orang yang memandang mereka dengan sebelah mata dan mengabaikan kehadiran, budaya, dan sejarah mereka. Orang Dayak secara efektif menjadi tergusur dari tanah yang mereka anggap sebagai milik mereka, dan tidak bisa ambil bagian dalam usaha-usaha baru. Menurut Peluso dan Harwell, Pemerintah Orde Baru mematok tapal batas di sekeliling desa, merancang-ulang keseluruhan lanskap tanah garapan, dan akhirnya mentransformasi gaya hidup ribuan warga.³⁵

Pada masa kekuasaan rezim Soeharto, masyarakat Dayak mengalami marginalisasi tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek budaya dan politik. Setelah tahun 1965, mereka kehilangan hampir semua kedudukan serta hak istimewa yang sebelumnya dinikmati pada periode kolonial akhir dan masa pemerintahan Presiden Soekarno. Para pemegang kekuasaan di Jakarta sering memandang masyarakat Dayak sebagai saudara sebangsa kelas dua yang dianggap kurang mencerminkan karakter “warga negara Indonesia modern”.³⁶

Budaya Dayak kerap dicap primitif dan tidak sejalan dengan visi budaya nasional. Akibatnya, perwakilan masyarakat Dayak dianggap tidak layak menduduki posisi penting dalam administrasi politik yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pada akhir masa kolonial hingga Orde Lama, mereka masih memiliki representasi di berbagai tingkatan administrasi lokal. Namun, pada masa Orde Baru, mereka secara sistematis tersingkir dari jabatan-jabatan politik di tingkat kabupaten hingga provinsi, digantikan oleh kelompok pendatang, termasuk masyarakat Madura.³⁷

Pada dekade 1990-an, masyarakat Dayak mulai menunjukkan kesadaran politik baru. Dengan dukungan beberapa LSM, mereka menyalurkan protes melalui media seperti *Kalimantan Review* dan aksi langsung. Menurut Davidson, aksi-aksi ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk memperjuangkan hak-hak kolektif dan masa depan yang lebih baik. Rasa persatuan, solidaritas, dan kesadaran politik yang sebelumnya tidak ada mulai terbentuk dan akhirnya memicu bentrok besar pada tahun 1997, di akhir era Orde Baru.³⁸

Frustrasi masyarakat Dayak terhadap masyarakat Madura terutama disebabkan oleh persepsi bahwa mereka sering bertikai dan merasa paling berjarak secara budaya dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya. Kedatangan mayoritas pendatang Madura bertepatan dengan masa kejayaan Orde Baru, yang semakin memperburuk situasi. Walaupun masyarakat Madura bukan pihak utama yang bertanggung jawab atas perubahan struktural yang merugikan Dayak, mereka sering dianggap sebagai “pengambil untung” dari kebijakan tersebut.³⁹

Orang Madura sering dipandang sebagai pengelola tanah yang diambil alih oleh negara dari masyarakat Dayak dan dialokasikan kepada pendatang. Hal ini menjadikan masyarakat Madura sasaran yang lebih mudah bagi kemarahan masyarakat Dayak dibandingkan pihak-pihak lain seperti perusahaan besar atau pemerintah. Selain itu, stereotip negatif yang berkembang tentang orang Madura semakin memperkuat citra mereka sebagai “musuh.” Stereotip ini, baik yang benar maupun tidak, memfasilitasi pengkambinghitaman masyarakat Madura dalam konflik yang terus berlanjut.

Dinamika Politik dan Konflik di Era Reformasi

Pada masa Reformasi, setelah lengsernya Soeharto, masyarakat Dayak melihat peluang untuk meningkatkan peran mereka di kancah politik lokal. Namun, kebangkitan politik masyarakat Dayak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Melayu yang merasa posisinya di birokrasi provinsi dan perekonomian mulai terancam. Sebagai respons, masyarakat Melayu memanfaatkan kebijakan desentralisasi yang baru diperkenalkan untuk memulai revitalisasi etnis mereka.

Menurut Davidson, Forum Komunikasi Pemuda Melayu (FKPM) muncul sebagai organisasi utama dalam menyalurkan kekecewaan masyarakat Melayu. FKPM, yang didominasi oleh tokoh-tokoh terkemuka dan pengusaha dengan reputasi meragukan, bekerja sama dengan kelompok pemuda dan preman untuk melampiaskan frustrasi mereka kepada orang Madura.⁴⁰ Meski orang Melayu memiliki banyak kesamaan budaya dengan orang Madura sebagai sesama Muslim, kekhawatiran atas kehilangan dominasi membuat mereka menuduh dua kelompok etnis—Dayak dan Madura—sebagai ancaman bersama. Melalui pengusiran dan likuidasi orang Madura di Sambas pada tahun 1999, FKPM memainkan peran penting dalam memperkuat identitas etnis Melayu dan mengamankan kepentingan mereka.

Proses kebangkitan identitas Melayu ini juga didukung oleh simbol-simbol budaya. Kraton bekas Kesultanan Pontianak dan Sambas menjadi pusat sejarah dan budaya Melayu. Pada Januari 2002, Pertemuan Adat Melayu Serantau diselenggarakan di Sambas dengan tujuan memperkuat identitas Melayu dan kerja sama rumpun Melayu di dalam maupun luar negeri. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Brunei, Sarawak, dan Filipina, yang menunjukkan upaya kolektif masyarakat Melayu untuk membangun solidaritas lintas batas.

Dalam bentrokan 1997 dan 1999, masyarakat Dayak dan Melayu awalnya merespons tindakan penyerangan oleh masyarakat Madura. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun masyarakat Madura sering kali dianggap sebagai pihak yang memulai kekerasan, mereka tidak berniat memicu konflik komunal. Mereka umumnya bertahan di kawasan mereka sendiri dan hanya mengambil langkah

defensif, seperti memasang barikade di jalan untuk melindungi diri dari potensi serangan.

Kekerasan yang terjadi mungkin dapat dicegah jika aparat keamanan bertindak lebih proaktif. Namun, selama pekan-pekan awal konflik, polisi dan tentara hanya terbatas pada membantu evakuasi orang Madura tanpa mengambil tindakan signifikan untuk menghentikan kekerasan. Tidak netralnya aparat keamanan turut memperburuk situasi, memungkinkan kekerasan terus berlangsung sebelum akhirnya mereka mencoba untuk campur tangan.

Kerentanan Madura dalam Konflik Etnis

Kerentanan masyarakat Madura dalam konflik di Kalimantan Barat tidak terlepas dari lemahnya struktur sosial dan representasi elite mereka dibandingkan dengan kelompok Dayak dan Melayu. Berbeda dengan Dayak dan Melayu yang memiliki tokoh-tokoh kuat di bidang politik, budaya, dan agama, masyarakat Madura hanya memiliki organisasi terbatas seperti cabang Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM). Organisasi ini, yang didirikan pada 1980-an oleh Jenderal Hartono dengan tujuan politik mendukung Golkar, kehilangan relevansinya setelah jatuhnya Orde Baru. Setelah evakuasi orang Madura, berbagai kelompok baru seperti Yayasan Korban Kerusuhan Sambas dan Himpunan Mahasiswa Madura Nasional dibentuk untuk membantu pemukiman kembali dan perundingan, tetapi upaya ini terbatas oleh kurangnya kesepakatan internal dan dukungan dari pihak luar. Akibatnya, masyarakat Madura menerima kenyataan bahwa mereka tidak mungkin kembali ke desa asal mereka dalam waktu dekat.

Dari perspektif teori konflik sosial, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan yang menjadi salah satu faktor utama dalam eskalasi konflik. Ralf Dahrendorf menjelaskan bahwa konflik sosial sering kali muncul karena distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat, di mana kelompok yang lebih lemah menjadi sasaran marginalisasi dan eksploitasi oleh kelompok yang lebih dominan. Dalam kasus ini, masyarakat Madura berada dalam posisi subordinat dibandingkan Dayak dan Melayu, yang lebih terorganisir dan memiliki akses ke sumber daya kekuasaan yang lebih besar. Ketidakseimbangan ini meningkatkan kerentanan mereka dalam konflik komunal yang terjadi.⁴¹

Pembersihan etnis masyarakat Madura dari pedalaman Pontianak tidak menghentikan kekerasan, tetapi lebih sebagai redistribusi arah konflik. Dominasi politik dan budaya Dayak di wilayah Bengkayang, serta dominasi Melayu di Sambas, menjadi indikator bahwa kedua kelompok ini belum mencapai tujuan mereka untuk menguasai seluruh provinsi. Menurut teori identitas primordial oleh Clifford Geertz, konflik seperti ini sering kali dipicu oleh pertahanan terhadap identitas etnis dan kultural yang dianggap terancam oleh kelompok lain.⁴² Dalam konteks ini,

masyarakat Dayak dan Melayu menggunakan konflik sebagai sarana untuk menegaskan identitas mereka sekaligus melindungi kepentingan kelompok mereka.

Ketegangan antara Dayak dan Melayu yang terus berlangsung juga menunjukkan dinamika baru dalam konflik etnis. Meskipun masyarakat Madura sebelumnya menjadi sasaran utama kekerasan, pergeseran fokus ke arah persaingan antara Dayak dan Melayu mengindikasikan bahwa konflik ini berakar pada perebutan dominasi struktural dan simbolik di tingkat lokal.⁴³ Konflik ini tidak hanya mencerminkan dimensi ekonomi dan politik, tetapi juga pertarungan simbolik untuk mempertahankan atau merebut status sosial di tengah masyarakat multikultural yang terus berubah.

Dinamika ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang konflik etnis di Indonesia. Konflik tidak hanya sekadar persoalan perbedaan budaya atau ekonomi, tetapi juga menyangkut ketegangan struktural yang lebih dalam, di mana identitas kelompok menjadi alat untuk memobilisasi kekuatan politik dan sosial. Dengan memahami faktor-faktor ini, strategi resolusi konflik dapat dirancang untuk menangani akar penyebab ketegangan, termasuk distribusi kekuasaan yang lebih merata dan pengakuan terhadap identitas kultural setiap kelompok.⁴⁴

Problematik Etnisitas dan Dinamika Identitas Primordial di Indonesia

Problematik etnisitas di Indonesia telah menjadi isu yang signifikan sejak awal kemerdekaan. Salah satu contoh awal adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 1950, yang mencerminkan upaya separatisme berbasis identitas etnis. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dirancang sebagai negara yang berdiri di atas keragaman, tantangan dalam pengelolaan pluralitas tetap besar.

Clifford Geertz, dalam teorinya tentang identitas primordial, menegaskan bahwa faktor etnisitas sering kali menjadi elemen yang melekat pada individu sejak lahir, berfungsi sebagai sumber kebanggaan dan keterikatan sosial.⁴⁵ Dalam konteks Indonesia, tesis ini terbukti dengan menguatnya identitas primordial setelah kemerdekaan. Ketidakseimbangan keterwakilan etnis dalam pemerintahan menjadi salah satu faktor yang memicu kebangkitan sentimen etnis, sebagaimana terlihat dalam isu “Jawa” versus “non-Jawa” yang mencuat pada periode awal kemerdekaan. Ketegangan ini diperburuk oleh faktor-faktor seperti kemunduran ekonomi, persaingan ideologi, dan kepentingan elite lokal, yang semuanya berkontribusi pada munculnya bibit sentimen keetnisan.

Selama periode Orde Lama, kekuatan etnis di beberapa daerah seperti Aceh, Riau, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Bali, Papua, dan Kalimantan Barat, termasuk suku Dayak, menantang narasi keindonesiaan yang mencoba mempersatukan identitas bangsa. Dinamika ini menunjukkan bahwa identitas etnis tetap menjadi

elemen penting dalam hubungan sosial dan politik di Indonesia. Seperti yang dijelaskan Geertz, keberlanjutan identitas keetnisan ini mencerminkan bagaimana ikatan primordial dapat bertahan meskipun negara telah mencapai status kemerdekaan.⁴⁶

Namun, pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, upaya kebangkitan etnisitas cenderung melemah. Kebijakan pemerintah yang didukung oleh militer mengadopsi pendekatan hegemonik untuk meredam kekuatan etnis melalui modernisasi dan pembangunan ekonomi-politik. Semua aspek kehidupan masyarakat diarahkan pada proses deideologisasi dan penyeragaman, yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh elemen bangsa dalam kerangka nasionalisme yang seragam.⁴⁷

Pendekatan ini sesuai dengan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf, yang menyatakan bahwa stabilitas sosial sering dicapai melalui dominasi oleh kelompok yang lebih kuat atas kelompok yang lebih lemah.⁴⁸ Dalam konteks Orde Baru, pemerintah memanfaatkan kekuatan militer dan birokrasi untuk meminggirkan ekspresi identitas etnis yang dianggap bertentangan dengan proyek pembangunan nasional. Meskipun kebijakan ini berhasil meredam ledakan kekuatan etnis dalam jangka pendek, pengabaian terhadap kebutuhan dan hak-hak kelompok etnis tertentu menciptakan tekanan sosial yang berpotensi memicu konflik di masa depan.

Diskusi ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang dinamika etnisitas di Indonesia dengan menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dan konteks sosial-politik memengaruhi ekspresi identitas primordial. Studi ini juga menyoroti pentingnya kebijakan inklusif dalam mengelola keragaman, agar konflik berbasis etnis dapat dicegah dan integrasi nasional tetap terjaga.⁴⁹

Ketimpangan Daerah, Era Reformasi, dan Kebangkitan Identitas Primordial

Meskipun kekuatan etnis melemah selama Orde Baru, muncul persoalan baru berupa ketimpangan daerah dan eksploitasi sumber daya alam (SDA). Ketimpangan ini menumbuhkan kesadaran baru di kalangan kelompok etnis, yang memandang diri mereka sebagai “korban” kebijakan pemerintah pusat. Pendekatan otoriter, represif, dan berorientasi “*top-down*” yang diambil oleh rezim Orde Baru hanya memperparah situasi. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya menekan kekuatan etnis, tetapi juga memunculkan sikap “dendam kolektif,” yang pada akhirnya melemahkan fondasi kesatuan bangsa.⁵⁰

Menurut teori konflik sosial oleh Johan Galtung, ketimpangan struktural dan eksploitasi sumber daya menciptakan apa yang disebut “kekerasan struktural,” di mana kelompok-kelompok tertentu secara sistematis dirugikan oleh sistem yang ada.⁵¹ Dalam konteks ini, eksploitasi SDA oleh pemerintah pusat dan pihak swasta yang didukung negara menyebabkan marginalisasi kelompok etnis yang tinggal di

daerah kaya sumber daya seperti Kalimantan. Marginalisasi ini menjadi pendorong munculnya tuntutan akan keadilan, baik secara ekonomi maupun politik.

Lahirnya era Reformasi pada tahun 1997 setelah tumbangunya rezim Orde Baru membawa angin segar dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Presiden Habibie membuka kran demokrasi yang luas, yang memungkinkan munculnya perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Salah satu langkah paling signifikan adalah penerapan kebijakan otonomi daerah.

Dengan kebijakan otonomi daerah, daerah-daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan lokal, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pemberian status otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh dan Papua menjadi langkah besar dalam merespons tuntutan daerah untuk mendapatkan porsi lebih besar dalam pengelolaan sumber daya mereka. Selain itu, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tingkat legislatif nasional, meskipun dengan fungsi yang terbatas, memberikan saluran baru bagi aspirasi lokal.⁵²

Proses demokrasi yang berlangsung setelah Reformasi juga membangkitkan kembali identitas primordial dan keetnisan. Setiap daerah mulai mencari jati diri dan identitas yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tetap dalam kerangka kesatuan nasional. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori identitas primordial Clifford Geertz, yang menekankan bahwa identitas etnis yang diwariskan sering kali menjadi fondasi bagi mobilisasi sosial dan politik ketika ada ancaman atau peluang yang relevan.⁵³ Dalam hal ini, kebangkitan identitas etnis di era Reformasi mencerminkan upaya daerah untuk menegaskan keberadaannya di tengah meningkatnya otonomi politik.

Di Kalimantan, misalnya, kebangkitan identitas etnis Dayak terlihat dalam upaya menata ulang organisasi dan nilai-nilai filosofis mereka. Nilai-nilai adat dan norma tradisional kembali ditekankan, tidak hanya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tetapi juga dalam pemerintahan lokal. Fenomena ini menunjukkan bagaimana identitas etnis yang terabaikan selama beberapa dekade sebelumnya kini menjadi sarana penting untuk memperjuangkan kepentingan lokal.

Kebijakan otonomi daerah dan kebangkitan keetnisan di era Reformasi memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pilar eksistensi daerah sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika,” negara tidak hanya dituntut untuk menjaga persatuan tetapi juga menjamin pemeliharaan dan perlindungan terhadap keberagaman etnis dan budaya yang menjadi kekayaan bangsa.

Prospek Pembangunan dan Akulturasi Pasca-Reformasi

Perkembangan di Kalimantan pasca-Reformasi menunjukkan kemajuan signifikan, baik dalam aspek sosial-ekonomi maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penduduk Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, kini menikmati kesejahteraan sosial yang jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Kondisi ini memberikan harapan baru untuk menciptakan suasana kondusif yang mendukung terbentuknya kohesi sosial yang harmonis.

Secara politis, masyarakat asli Dayak telah berhasil meningkatkan status sosial mereka dengan menduduki posisi strategis di eksekutif maupun legislatif. Contohnya, beberapa jabatan gubernur di provinsi-provinsi Kalimantan kini dijabat oleh tokoh Dayak, seperti Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Begitu pula dalam pemilihan kepala daerah, masyarakat Dayak sering kali memenangkan jabatan tersebut. Keberhasilan ini mencerminkan keberlanjutan kebangkitan identitas etnis Dayak sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan politik lokal.

Di bidang ekonomi, tingkat pertumbuhan di Kalimantan terus meningkat setiap tahunnya. Secara bertahap, ini membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, yang sebelumnya menjadi salah satu penyebab utama konflik. Menurut teori modernisasi oleh Samuel P. Huntington, pembangunan ekonomi yang inklusif dapat memperkuat stabilitas sosial dengan mereduksi ketegangan yang bersumber dari ketimpangan sosial.⁵⁴ Dalam konteks ini, kemajuan ekonomi di Kalimantan diharapkan dapat mereduksi konflik yang sebelumnya sering kali muncul akibat kesenjangan sumber daya.

Namun, meskipun ada kemajuan tersebut, akulturasi budaya tetap menjadi tantangan penting. Dalam hal ini, penduduk pendatang, seperti orang Madura, perlu mengambil pelajaran dari konflik masa lalu dengan lebih memahami dan menghormati budaya lokal Dayak. Ungkapan tradisional “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” mencerminkan pentingnya adaptasi budaya sebagai dasar hubungan sosial yang harmonis.

Menurut responden Ketua Dewan Adat Nasional (MADN), salah satu kunci untuk mengurangi konflik adalah perubahan sikap etnis Madura dalam menghormati tradisi budaya lokal, terutama dalam menghormati situs-situs budaya leluhur Dayak. Pandangan ini sejalan dengan teori multikulturalisme yang menekankan pentingnya saling menghormati dan pengakuan terhadap keberagaman budaya untuk menciptakan harmoni sosial.⁵⁵ Etnis Madura, yang selama ini cenderung hidup eksklusif dalam pola pemukiman berkelompok, diharapkan dapat lebih membaur dengan kelompok lain untuk membangun interaksi sosial yang inklusif.

Multikulturalisme, sebagaimana diuraikan oleh Bhikhu Parekh, mencakup sikap penghargaan terhadap perbedaan etnis, agama, dan budaya sebagai elemen kunci

dalam menciptakan masyarakat yang inklusif.⁵⁶ Filosofi ini menekankan pentingnya saling respek, tanggung jawab sosial, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak. Jika diterapkan, pandangan multikulturalisme dapat menjadi fondasi untuk mencegah konflik dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara kelompok etnis di Kalimantan.

Komunikasi dan Mediasi: Membangun Koeksistensi Sosial

Komunikasi yang intensif dan timbal balik antara masyarakat Dayak dan Madura merupakan elemen kunci dalam membangun koeksistensi sosial yang harmonis di Kalimantan. Kurangnya komunikasi sering kali memperbesar masalah kecil hingga memicu konflik yang lebih masif. Dalam konteks ini, dialog antara pemerintah, tokoh formal dan informal, serta tokoh muda dapat menjadi jembatan untuk mencari titik temu dan menghindari munculnya konflik baru.

Pendekatan yang disarankan melibatkan dua metode utama: fasilitasi dan mediasi. **Fasilitasi** adalah proses di mana seorang pihak netral membantu kelompok-kelompok yang bersengketa untuk meningkatkan cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah mereka secara kolektif tanpa mengambil kebijakan langsung. Sementara itu, **mediasi** adalah proses penengahan di mana seorang mediator bertindak sebagai saluran komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, tanggung jawab untuk mencapai perdamaian tetap berada pada pihak yang bersengketa, tetapi mediator membantu memperjelas pandangan yang berbeda dan mendamaikan konflik tersebut.⁵⁷

Menurut teori resolusi konflik oleh John Paul Lederach, proses fasilitasi dan mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun struktur hubungan yang lebih kuat antara kelompok-kelompok yang berselisih.⁵⁸ Proses ini dapat meningkatkan kapasitas komunitas untuk menghadapi perbedaan di masa depan dan membangun kepercayaan di antara mereka.

Pendekatan ini juga didukung oleh responden dari etnis Madura, yang menekankan pentingnya *new vision* atau perubahan cara pandang yang lebih terbuka dan inklusif. Mereka menyoroti perlunya mengatasi hambatan struktural, kultural, dan intelektual melalui peningkatan pendidikan. Pandangan ini sejalan dengan konsep *transformasi konflik* yang menekankan pentingnya perubahan sikap, perilaku, dan struktur sosial untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.⁵⁹

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan

Dalam konteks bernegara, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kohesi sosial. Agenda yang tepat sasaran perlu dirancang untuk mengatasi disparitas antara kelompok mayoritas dan minoritas. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti:

- 1) **Penegakan Hukum yang Tegas:** Aparat penegak hukum harus bersikap netral dan tegas dalam menangani konflik untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan.
- 2) **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Pemerintah perlu mendukung masyarakat Dayak dalam mengolah sumber daya alam mereka untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan kesenjangan ekonomi.
- 3) **Kebijakan Inklusif:** Peraturan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk membangun wilayahnya harus diperkuat, sehingga mereka tidak terisolasi atau tertinggal.

Dalam pandangan Galtung, langkah-langkah ini penting untuk mengurangi “kekerasan struktural,” yaitu situasi di mana sistem sosial, politik, atau ekonomi secara sistematis merugikan kelompok tertentu.⁶⁰ Dengan mengurangi ketimpangan yang ada, potensi konflik dapat diminimalkan dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Harapan akan terciptanya akulturasi budaya di Kalimantan juga sejalan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme. Konsep ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman budaya dan pengakuan atas kontribusi masing-masing kelompok dalam membangun masyarakat.⁶¹ Filosofi ini mencakup nilai-nilai seperti saling respek, tanggung jawab sosial, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak. Jika diterapkan, multikulturalisme dapat menjadi landasan untuk mengurangi konflik dan memperkuat kohesi sosial di Kalimantan.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara etnis Dayak dan Madura sebenarnya dipicu oleh hal yang sepele dan sifatnya personal, seperti senggolan antar orang Dayak dan Madura, tapi masalah itu menjadi besar karena senggolan itu dilanjutkan dengan perkelahian, bahkan ada yang sampai meninggal. Karena ada isu bahwa orang Dayak telah dibunuh oleh orang Madura sampai meninggal, maka orang-orang Dayak berkumpul untuk melakukan balas dendam.

Sejarah konflik etnis Dayak dengan Madura di Kalimantan Barat merupakan suatu sejarah yang panjang dan terus berulang serta cenderung semakin membesar, baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Ini mengindikasikan bahwa resolusi yang dilakukan belum berhasil. Resolusi yang gagal dapat disebabkan oleh tidak diketahuinya secara tuntas akar penyebab konflik tersebut. Konflik sosial yang berkepanjangan itu disebabkan oleh tidak adanya informasi yang cukup dan mendalam tentang konflik sosial itu sendiri. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi konflik itu dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menangani konflik, tetapi bisa jadi ini memang disengaja oleh karena adanya berbagai kepentingan lain yang tersembunyi di balik konflik itu.

Karena tidak terselesaikan dengan baik, maka potensi konflik akan tetap ada bahkan bisa menjadi besar. Konflik yang berulang menandakan resolusi yang dilakukan belum menyentuh akar penyebab konflik tersebut. Gagalnya resolusi konflik itu membawa dampak pada terjadinya konflik terbuka yang berkepanjangan dan menimbulkan apa yang disebut oleh Nobel dengan kejahatan yaitu perang.

Konflik bernuansa etnis antara Dayak dan Madura di Kalimantan Barat telah terjadi beberapa kali. Dengan kronologis konflik berdarah dalam rentang waktu tahun 1950 hingga 2001. Untuk menghindari munculnya konflik di masa mendatang, metode fasilitasi dan mediasi harus tetap digalakkan.

Catatan Kaki

1. M. Amin Nurdin, "Islam Di Eropa: Mendayung Di Antara Debat dan Negosiasi," *Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (January 11, 2018): 155–166; Asep Mahpudz, "Pembelajaran Toleransi dan Kearifan Lokal pada Masyarakat Plural: Belajar dari Penyelesaian Konflik Sosial di Poso," in *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 10* (Presented at the Seminar Kebangkitan Nasional, Purwokerto, 2023).
2. Deri Ciciria, Ketut Akeh, and Magrilisa Magrilisa, "Potensi Konflik Di Kabupaten Tulang Bawang Barat," *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education* 3, no. 1 (June 30, 2022): 122; Christiany Juditha, "Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (June 17, 2015), accessed December 22, 2024, <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/445>.
3. Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), 73–75; Ilovia Ayaregita Widayat Et Al., "Konflik Poso : Sejarah Dan Upaya Penyelesaiannya," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 13, no. 1 (June 15, 2021): 1–9.
4. Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973), 259–263.
5. Syafuan Rozi, *Rozi, Syafuan. et.al. (Ed.). 2019. Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, dan Papua. Jakarta: Bumi Aksara., n.d., 19.*
6. Francis Fukuyama, *Identity: The Demand for Dignity and the Politics Resentmen* (New York: Farra. Dtraus & Giroux, 2018).
7. Hemafitria Hemafitria, "Konflik Antar Etnis Melalui Penguatan Wawasan Multikultural," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (June 17, 2019): 1; Rozi, Rozi, Syafuan. et.al. (Ed.). 2019. *Politik Identitas: Problematika Dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua. Jakarta: Bumi Aksara., 12.*
8. Hemafitria, "Konflik Antar Etnis Melalui Penguatan Wawasan Multikultural," 3.
9. Sukamdi, Abdul Haris, and Patrick Browslee, *Migrasi Buruh Di Indonesia, Politik Dan Praktis* (Yogyakarta: Population Students Centre Gajah Mada University, 2000), 125.
10. *Data Sensus Penduduk 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia., n.d.), accessed March 16, 2021, <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&cwid=0>.
11. Chaider S. Bamualim et al., "Communal Conflicts in Contemporary Indonesia" (Presented at the International Workshop on Ethno-Religious Conflicts in Indonesia Today, Jakarta: The Konrad Adenauer Foundation., 2002), 3; Mohammad Ali Al Humaidy, "Analisis Stratifikasi

- Sosial Sebagai Sumber Konflik Antar Etnik di Kalimantan Barat,” *KARSA* XII, no. 2 (2007): 186–195.
12. Suparlan, *Suku Bangsa Dan Hubungan Antar Suku Bangsa* (Jakarta: . 2005 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2005), 98.
 13. Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi Dan Penelitian*, 184–186.
 14. Hemsafitria, “Konflik Antar Etnis Melalui Penguatan Wawasan Multikultural,” 3.
 15. Jamal Bake and Muhammad Abas Rinusu, *Netralitas Yang Semu: Mengungkap Keberadaan Aparat Keamanan Dalam Berbagai Konflik Etnik Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), 2000), 48.
 16. Yudie Haryono, *Neo Tribalisme* (Jakarta: Kompas, 2000), 30.
 17. Verelladevanka Adryamarthanino and Nibras Nada Nailufar, “Kerusuhan Sambas 1999: Penyebab, Kronologi, Dan Dampak,” *Kompas.Com*, Agustus 2021, accessed December 21, 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/06/150000479/kerusuhan-sambas-1999-penyebab-kronologi-dan-dampak>.
 18. Nico Andasputra et al., *Sisi Gelap Kalimantan Barat: Perseteruan Etnis Dayak - Madura 1997* (Jakarta: ISAI, 1999).
 19. Geertz, *The Interpretation of Culture*, 259–263.
 20. Edward W. Said, *Orientalism* (New York: Pantheon Books, 1978).
 21. Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (Oslo: International Peace Research Institute, 1996).
 22. Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford: Stanford University Press, 1959).
 23. Geertz, *The Interpretation of Culture*, 259–263.
 24. Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996).
 25. Said, *Orientalism*.
 26. Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*.
 27. Edi Petebang and Eri Sutrisno, eds., *Konflik Etnis Di Sambas* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2000), 203.
 28. Edi Petebang and Eri Sutrisno, eds., “Kasus Sukadana: Eksploitasi Ekonomi Dalam Konflik Lokal Di Kalimantan,” *Jurnal Sejarah Lokal Indonesia* (1993).
 29. Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1991).
 30. Nancy Lee Peluso and Emily Harwell, eds., *Territory, Custom, and the Cultural Politics of Ethnic War in West Kalimantan*. in *Violent Environments* (Ithaca: Cornell University Press, 2001), 123–143.
 31. Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*.
 32. Donald L. Horowitz, *Ethnic Groups in Conflict* (Berkeley: University of California Press, 1985).
 33. Peluso and Harwell, *Territory, Custom, and the Cultural Politics of Ethnic War in West Kalimantan*. in *Violent Environments*, 32.
 34. Reed L. Wadley, “Lines in the Forest. Internal Territorialization and Local Accommodation in West Kalimantan, Indonesai (1865-1979),” *South East Asia Research* 11, no. 1 (2003): 91–112.
 35. Peluso and Harwell, *Territory, Custom, and the Cultural Politics of Ethnic War in West Kalimantan*. in *Violent Environments*, 94.
 36. J Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 45.

37. J. S. Davidson, *'Primitive' Politics: The Rise and Fall of the Dayak Unity Party in West Kalimantan, Indonesia* (Singapore: Asia Research Institute, 2003), 5.
38. J. S. Davidson, "The Politics of Violence on an Indonesian Periphery," *South East Asia Research* 11, no. 1 (2003): 70–74.
39. Peluso and Harwell, *Territory, Custom, and the Cultural Politics of Ethnic War in West Kalimantan*. in *Violent Environments*, 114.
40. Davidson, "The Politics of Violence on an Indonesian Periphery," 79–80.
41. Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*.
42. Geertz, *The Interpretation of Culture*, 259–263.
43. Huub de Jonge, *Garam, Kekerasan, Dan Aduan Sapi: Esai-Esai Tentang Orang Madura Dan Kebudayaan Madura* (Yogyakarta: LKIS, 2011), 211.
44. Jonge, *Garam, Kekerasan, Dan Aduan Sapi: Esai-Esai Tentang Orang Madura Dan Kebudayaan Madura*, 211.
45. Geertz, *The Interpretation of Culture*, 259–263.
46. Geertz, *The Interpretation of Culture*, 259–263.
47. Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*.
48. Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*.
49. Rozi, Rozi, Syafuan. et.al. (Ed.). 2019. *Politik Identitas: Problematika Dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua*. Jakarta: Bumi Aksara., 12.
50. Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*.
51. Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*.
52. Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*.
53. Geertz, *The Interpretation of Culture*, 259–263.
54. Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968).
55. Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2000).
56. Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*.
57. John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* (Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1997).
58. Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*.
59. Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, and Tom Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts* (Cambridge: Polity Press, 2011).
60. Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*.
61. Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*.

Daftar Pustaka

- Adryamarthanino, Verelladevanka, and Nibras Nada Nailufar. "Kerusuhan Sambas 1999: Penyebab, Kronologi, dan Dampak." *Kompas.Com*, Agustus 2021. Accessed December 21, 2021. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/06/150000479/kerusuhan-sambas-1999-penyebab-kronologi-dan-dampak>.
- Al Humaidy, Mohammad Ali. "Analisis Stratifikasi Sosial Sebagai Sumber Konflik Antar Etnik di Kalimantan Barat." *KARSA XII*, no. 2 (2007): 186–195.
- Andasputra, Nico, Bimo Nugroho, Stepanus Djuweng, and Nurartha Situmorang. *Sisi Gelap Kalimantan Barat: Perseteruan Etnis Dayak - Madura 1997*. Jakarta: ISAI, 1999.
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1991.
- Bake, Jamal, and Muhammad Abas Rinusu. *Netralitas Yang Semu: Mengungkap Keberadaan Aparat Keamanan dalam Berbagai Konflik Etnik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), 2000.
- Bamualim, Chaider S., Karlina Helmanita, Amelia Fauzia, and E. Kusnadinigrat. "Communal Conflicts in Contemporary Indonesia." Jakarta: The Konrad Adenauer Foundation., 2002.
- Bertrand, J. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Ciciria, Deri, Ketut Akeh, and Magrilisa Magrilisa. "Potensi Konflik Di Kabupaten Tulang Bawang Barat." *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education* 3, no. 1 (June 30, 2022): 122.
- Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press, 1959.
- Davidson, J. S. *'Primitive' Politics: The Rise and Fall of the Dayak Unity Party in West Kalimantan, Indonesia*. Singapore: Asia Research Institute, 2003.
- . "The Politics of Violence on an Indonesian Periphery." *South East Asia Research* 11, no. 1 (2003).
- Fukuyama, Francis. *Identity: The Demand for Dignity and the Politics Resentmen*. New York: Farrar, Straus & Giroux, 2018.
- Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Oslo: International Peace Research Institute, 1996.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Culture*. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
- Haryono, Yudie. *Neo Tribalisme*. Jakarta: Kompas, 2000.
- Hemafitria, Hemafitria. "Konflik Antar Etnis Melalui Penguatan Wawasan Multikultural." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (June 17, 2019): 1.

- Horowitz, Donald L. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press, 1985.
- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 1968.
- . *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster, 1996.
- Jonge, Huub de. *Garam, Kekerasan, dan Aduan Sapi: Esai-esai Tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura*. Yogyakarta: LKIS, 2011.
- Juditha, Christiany. “Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (June 17, 2015). Accessed December 22, 2024. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/445>.
- Lederach, John Paul. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1997.
- Mahpudz, Asep. “Pembelajaran Toleransi dan Kearifan Lokal pada Masyarakat Plural: Belajar dari Penyelesaian Konflik Sosial di Poso.” In *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 10*. Purwokerto, 2023.
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, and Tom Woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. Cambridge: Polity Press, 2011.
- Nurdin, M. Amin. “Islam Di Eropa: Mendayung Di Antara Debat dan Negosiasi.” *Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (January 11, 2018): 155–166.
- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- Peluso, Nancy Lee, and Emily Harwell, eds. *Territory, Custom, and the Cultural Politics of Ethnic War in West Kalimantan*. in *Violent Environments*. Ithaca: Cornell University Press, 2001.
- Petebang, Edi, and Eri Sutrisno, eds. “Kasus Sukadana: Eksploitasi Ekonomi dalam Konflik Lokal Di Kalimantan.” *Jurnal Sejarah Lokal Indonesia* (1993).
- , eds. *Konflik Etnis Di Sambas*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2000.
- Rozi, Syafuan. *Rozi, Syafuan. et.al. (Ed.). 2019. Politik Identitas: Problematika Dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan Di Aceh, Riau, Bali, Dan Papua*. Jakarta: Bumi Aksara., n.d.
- Said, Edward W. *Orientalism*. New York: Pantheon Books, 1978.
- Sukamdi, Abdul Haris, and Patrick Browslee. *Migrasi Buruh Di Indonesia, Politik Dan Praktis*. Yogyakarta: Population Students Centre Gajah Mada University, 2000.
- Suparlan. *Suku Bangsa Dan Hubungan Antar Suku Bangsa (Jakarta: . 2005*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2005.

- Wadley, Reed L. "Lines in the Forest. Internal Territorialization and Local Accommodation in West Kalimantan, Indonesai (1865-1979)." *South East Asia Research* 11, no. 1 (2003): 91–112.
- Widayat, Ilovia Ayaregita, Diana Mutiara Bahari, Azka Azzahra Salsabila, Nabila Rizky Sri Handayani, and Hanna Khairunnisa Adjie. "Konflik Poso : Sejarah dan Upaya Penyelesaiannya." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 13, no. 1 (June 15, 2021): 1–9.
- Wirawan. *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2016.
- Data Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia., n.d. Accessed March 16, 2021. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>.

Agus Darmaji, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; Email: agus.darmaji@uinjkt.ac.id

M. Amin Nurdin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; Email: amin.nurdin@uinjkt.ac.id

Muhammad Hafiy bin Abd Razak, Maahad Tahfiz Pondok Air Jernih Malaysia; Email: hafiy.rasmi@yahoo.com